# Daftar Pustaka

## Buku:

Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.

Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Burlian, Paisol, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Palembang: NoerFikri, 2014.

Deliarnoor, Nandang Alamsah, *et. al*., *Teori Dan Praktek Kewenangan*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Effendi, Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Jakarta: Referensi, 2013.

Fahrojih, Ikhwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016. Ghony, M. Junaidi, dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif,

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Gultom, Maidin, Suatu Analisi Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Bandung: Refika, 2017.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

 , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Isretno, Evita, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan Dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press, 2020.

98

Kartayasa, Mansur, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana, 2017.

Pujileksono, Sugeng, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Malang: Intrans Publishing, 2015.

Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016.

Rosikah, Chatrina Darul, dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

S. Salim H., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Soehartono, Irawan, *Metode Penulisan Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Artikel Jurnal:

Abdurrachman, Hamidah, and Nayla Majestya. "Freedom of Opinion in Perspective Renewal of The Indonesian KUHP." *Legal Readiness to Face Digital Transformation* (2022): 106.

https://repository.uir.ac.id/20446/1/Legal%20Readines%20to%20face%20di gital%20transformations.pdf#page=115.

Alwi, Helmi, “Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Mimbar Keadilan*, Volume 15, Nomor 1, Februari 2022. https://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/5889/4625.

Batubara, Sonya Airini, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Voume 18, Nomor 2,

2019.https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/viewFile/1168/929.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi I, Juni 2020.

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859.

Fauzia, Ana, dan Fathul Hamdani, “Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 3, Nomor 7, Juli 2022.

https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/249/160/1 211.

Gandara, Moh, “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat”, *Khazanah Hukum*, Volume 2 Nomor 3, 2020.

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/8187/4933.

Habibi, Muhammad, “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Cepalo Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2020.

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1962/1545#:~

:text=Artinya%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20pun,terhadap

%20perkara%20tindak%20pidana%20korupsi.

Hapsari, Duwi, dan Maria Madalina, “Menelisik Pembentukan Perundang- Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 3, 2022.

https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/download/179/182.

HSB, Ali Marwan, dan Evlyn Martha Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2018. https://osf.io/ze26u/download.

Hutahaean, Armunanto, dan Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia,* Volume 16, Nomor.1, Maret 2019. [http://e-](http://e-/) jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/453/pdf.

Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Al Adl*, Volume IX, Nomor 3, Desember 2017.

https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi- sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf.

Kum, Muhammad Akbar, “Hukum Indonesia Makin Lemah Terhadap Koruptor”, *Unes Law Review*, Volume 5, Nomor 3, Maret 2023. https://review- unes.com/index.php/law/article/download/365/250/.

Lanongbuka, Billy, “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen,* Volume IX, Nomor 4, Oktober-Desember 2020,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30807/29587>.

Mahardika dan Firman Wijaya, “Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019.

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1962/1545#:~

:text=Artinya%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20pun,terhadap

%20perkara%20tindak%20pidana%20korupsi.

Makarewa, Irene Trinita, “Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP”, *Lex Crimen*, Volume X, Nomor 9, Agustus 2021. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/36555/33 995.

Mantolas, Edi Boni, dan I Putu Eka Cakra, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 Dan UU Nomor 19 Tahun 2019)”,

*Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 6, Nomor 9, September 2021. https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax- literate/article/view/4195/2416.

Marus, Rafsanjani Is, dan Wahyu Eka Putra, “Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Kementerian Dan Lembaga Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Kerangka UNCATOC & UNCAC Dan Kaitannya Dengan UU Keimigrasian”, *Journal Of Law And Border Protection*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020. https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/200/166.

Nada, Izzah Qotrun, “Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan MK)”, *Constitution Journal*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022. https://constitution.uinkhas.ac.id/cj/article/download/9/7.

Puasa, Rafly Rilandi, dan Johny Lumolos, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volome 1, Nomor 1, Tahun 2018.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/211 20/20831

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Hukum UIN Antasari Banjarmasin Alhadharah*, Volume 17, Nomor 33, Januari-Juni 2018.

https://jurnal.uin- antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691.

Rohmad, Jony Fauzur, dan Sjaifurrachman, “Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka”, *Adil: Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2021. https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal- ADIL/article/download/2110/1002.

RS, Aryanita Berlyan, dan Azzahra Fildza S., “Kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Laut Di Indonesia”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 5, Nomor I, Maret 2023. [http://jurnal.law.uniba-](http://jurnal.law.uniba-/) bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/688/pdf

Safrina, Anne, dan W.M. Herry Susilowati, “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana”, *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 1, Februari 2017.

https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/17641/16452.

Sahabuddin, Andi Arfan, Dan Riswan, “Syarat Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Jass,

Volume 4, Nomor 1, Januari 2023. https://journal- stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass/article/view/134/141.

Santiago, Faisal, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum”, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017.

https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/268.

Setiadi, Wicipto, “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 3 Tahun 2018. [https://e-](https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234/pdf) [jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234/pdf](https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234/pdf).

Sialangan, Helman Cipta, dan Isfandir Hutasoit, “Tinjauan Yuridis Upaya Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Petita, Volume 3, Nomor 2, Desember 2021.

https:/[/www.journal.unrika.a](http://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/3844/pdf_1)c[.id/index.php/petita/article/view/3844/pdf\_1](http://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/3844/pdf_1)

Sitohang, Hisar, dan Martono Anggusti, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif”, *Patik: Jurnal Hukum*, Volume 07 Nomor 02, Agustus 2018.

https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/285/399/2109.

Sugiharto, Imawan, Ratna Riyanti, dan Hamidah Abdurrachman, "Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 8, Nomor 2, 2020. https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/100/30.

Sukmareni dan Ujuh Juhana, “Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 3, Nomor 2. 2020.

https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1876.

Susanto, Sri Nur Hari, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 3, Issue 3, September 2020.

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/9530/4869.

Tallaut, Lambertus Josua, dan Ade Adhari, “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 5, Nomor 1, April 2022.

https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/3426/1067/8 761.

Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, Nomor 8, Tahun 2021. [http://jurnal.um-](http://jurnal.um-/) tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191.

Tongat, *et. al*., “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1717/pdf/3465

Waani, Daniel Hendry Gilbert, “Kewenangan Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 7, September 2015.

https://media.neliti.com/media/publications/3356-ID-kewenangan-dan- peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-penyidikan-dan-penuntu.pdf.

Widjojanto, Bambang, “Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi”,

*Integritas*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017. https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/Jurnal-INTEGRITAS-Volume-3-No-1- tahun-2017/Jurnal-INTEGRITAS-Volume-3-No-1-tahun-2017-02.pdf.

## LAMPIRAN